

Etika Politik Islam dalam Masyarakat Kontemporer: Perspektif Al-Mawardi

Dwi Fa'yi Arya Sakhi

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Corresponding Author: e-mail: 10200122093@uin-alauddin.ac.id

Putri Aprilyana Idi Amin

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
e-mail: 10200122094@uin-alauddin.ac.id

Kurniati

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
e-mail: kurniati@uin-alauddin.ac.id

ABSTRACT

This research focuses on the need to understand how the concept of political ethics offered by Al-Mawardi, a renowned scholar and legal expert in the classical Islamic tradition, can be implemented in a modern context. The aim of this research is to explore and understand normative concepts in Al-Mawardi's political ethics and evaluate their relevance and practical application in contemporary political dynamics. This research uses a qualitative approach with descriptive-analytical methods. Data was collected through a literature study which involved reviewing primary literature, especially Al-Mawardi's works such as "Al-Ahkam al-Sultaniyyah", and secondary literature such as books, journal articles and relevant papers. Data analysis was carried out by identifying key themes in Al-Mawardi's thinking and linking them to current political challenges. The author finds that the principles of moral responsibility, justice and administrative efficiency introduced by Al-Mawardi are still relevant and can be adapted to create good governance and create a socially just society. It is hoped that the results of this research will be able to provide a significant contribution in understanding and implementing Islamic political ethics in a modern context.

Keywords: Al Mawardi, Islamic Political Ethics, Contemporary Society

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada kebutuhan untuk memahami bagaimana konsep etika politik yang ditawarkan oleh Al-Mawardi, seorang ulama dan ahli hukum tersohor dalam tradisi Islam klasik, dapat diimplementasikan dalam konteks modern. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali dan memahami konsep-konsep normatif dalam etika politik Al-Mawardi serta mengevaluasi relevansi dan aplikasi praktisnya dalam dinamika politik kontemporer. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui studi pustaka yang melibatkan penelaahan terhadap literatur primer, terutama karya-karya Al-Mawardi seperti "Al-Ahkam al-Sultaniyyah", dan literatur sekunder seperti buku, artikel jurnal, dan makalah yang relevan. Analisis data dilakukan

dengan mengidentifikasi tema-tema kunci dalam pemikiran Al-Mawardi dan mengaitkannya dengan tantangan politik masa kini. Penulis menemukan bahwa prinsip tanggung jawab moral, keadilan, dan efisiensi administrasi yang diperkenalkan oleh Al-Mawardi masih relevan dan dapat diadaptasi untuk menciptakan tata kelola yang baik dan menciptakan masyarakat yang berkeadilan sosial. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami dan mengimplementasikan etika politik Islam dalam konteks modern.

Kata Kunci: Al Mawardi, Etika Politik Islam, Masyarakat Kontemporer

PENDAHULUAN

Penerapan etika politik Islam dalam masyarakat kontemporer merupakan sebuah topik yang relevan dan penting dalam konteks global pada masa ini, terkhusus mengingat tantangan dan dinamika politik yang semakin berkembang. Etika politik Islam, sebagaimana yang digambarkan oleh seorang ahli hukum bernama Al-Mawardi, merumuskan pandangan yang mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip etika dan moral dapat dibumikan dalam pemerintahan dan kehidupan politik. Al-Mawardi, yang merupakan seorang politikus dan ahli hukum dari abad ke-11, menyatakan pentingnya moralitas dalam kepemimpinan dan pemerintahan, dan bagaimana nilai-nilai etika dan moralitas dalam Islam dapat diterapkan untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan adil (Al-Mawardi, 2000).

Penulis sangat setuju bahwa implementasi etika politik Islam dalam masyarakat kontemporer adalah relevan dan penting, terutama mengingat tantangan dan dinamika politik global saat ini. Al-Mawardi, dalam karyanya yang mendalam, menekankan pentingnya moralitas dan etika dalam kepemimpinan dan pemerintahan, serta bagaimana nilai-nilai Islam dapat diterapkan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis. Pendekatan yang dilakukan Al-Mawardi terhadap etika politik, yang mencakup prinsip tanggung jawab moral, keadilan, dan partisipasi kolektif, memberikan panduan berharga yang dapat membantu mengatasi berbagai masalah politik dan sosial di dunia modern. Penerapan prinsip-prinsip ini mampu memperkuat kepercayaan publik, meningkatkan transparansi, dan menciptakan pemerintahan yang lebih efisien dan bertanggung jawab.

Dalam karya monumentalnya, "Al-Ahkam al-Sultaniyyah," Al-Mawardi menawarkan panduan lengkap mengenai administrasi publik dan kebijakan politik berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dia menekankan bahwa pemimpin harus memiliki integritas moral dan etika yang tinggi serta bertindak demi kesejahteraan rakyat. Prinsip-prinsip tersebut meliputi keadilan, kejujuran, dan pelayanan kepada masyarakat, yang semuanya berakar pada ajaran Islam. (Al-Sayyid-Marsot, 2007). Penerapan dari nilai-nilai ini dalam konteks kontemporer merupakan tantangan yang kompleks, terutama di tengah banyaknya budaya dan agama yang ada di banyak negara modern.

Ajaran Islam merupakan ajaran yang menghargai dan mengedepankan moderasi beragama dalam konsepnya, sehingga terbukti mampu

menciptakan kedamaian di dalam masyarakat yang beranekaragam (Kurniati et al., 2022), Etika politik Islam menghighlight pentingnya moralitas serta akhlak dalam kehidupan publik. Al-Mawardi, sebagai contoh, percaya bahwa keadilan merupakan pilar utama di dalam pemerintahan. Dalam konteks masyarakat kontemporer, penerapan konsep keadilan dapat diamati dalam upaya untuk memastikan hak-hak asasi manusia tetap dihormati dan dijaga, begitu pula dalam pembuatan kebijakan yang inklusif dan berkeadilan sosial. Selain itu, etika Islam mengharuskan transparansi dan akuntabilitas dalam kepemimpinannya, yang berarti bahwa pejabat publik harus dapat bertanggung jawab atas tindakan mereka dan selalu mengedepankan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi (Esposito, 1998). Etika politik Islam, seperti yang diajukan oleh Al-Mawardi, mengutamakan keadilan sebagai pilar utama pemerintahan, relevan dalam konteks masyarakat kontemporer melalui penghormatan kebijakan inklusif dan hak asasi manusia. Selain itu, etika ini menekankan akuntabilitas dan transparansi di dalam kepemimpinannya.

Dalam masyarakat modern yang dipengaruhi oleh teknologi dan globalisasi, tantangan dalam penerapan etika politik Islam mencakup integrasi nilai-nilai tradisional dengan tuntutan zaman modern. Sebagai contoh, isu-isu seperti korupsi, hak asasi manusia, dan demokrasi harus ditangani dengan pendekatan yang tidak hanya berlandaskan hukum Islam tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial dan politik yang lebih luas. (Mawdudi, 2016). Dalam hal ini, pemikiran dari Al-Mawardi menawarkan kerangka kerja yang bisa diadaptasi dan diimplementasikan untuk memenuhi kebutuhan zaman sekarang yang semakin kompleks.

Sebagai contoh, Al-Mawardi menjelaskan pentingnya syura (musyawarah) di dalam pengambilan keputusan politik. Dalam konteks masyarakat modern, prinsip ini dapat dipahami ke dalam praktik demokrasi partisipatif yang mana suara masyarakat dihargai dan didengar dalam proses pembuatan kebijakan. Selain itu, konsep keadilan distributif yang diutamakan oleh Al-Mawardi dapat dilihat dalam upayanya untuk mengurangi ketimpangan dalam aspek ekonomi dan memastikan penyaluran sumber daya yang adil di semua lapisan masyarakat (Farooq, 2017). Prinsip syura (musyawarah) yang ditawarkan oleh Al-Mawardi dapat diadaptasi ke dalam praktik demokrasi partisipatif modern, memastikan suara masyarakat didengar dalam pembuatan kebijakan. Selain itu, konsep keadilan distributifnya menekankan pengurangan ketimpangan dalam aspek ekonomi dan distribusi sumber daya yang adil di antara semua lapisan masyarakat.

Namun, dalam menerapkan etika politik Islam dalam masyarakat kontemporer terdapat banyak tantangan. Salah satu tantangan utama adalah pandangan yang berbeda-beda dari prinsip-prinsip syariah itu sendiri. Dalam konteks global yang beragam, interpretasi yang ketat atau ekstrem dari hukum Islam dapat memicu konflik dan ketidakadilan. Oleh karena itu, pendekatan yang moderat dan inklusif, yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan konteks sosial, sangat penting (An-Na'im, n.d.).

Selain itu, terdapat tantangan dalam hal pendidikan dan pemahaman masyarakat terkait etika politik Islam. Banyak orang masih kurang memahami prinsip-prinsip dasar yang diajarkan dalam Islam tentang kepemimpinan dan pemerintahan. Oleh sebab itu, pendidikan yang menyeluruh tentang etika politik Islam dan bagaimana prinsip-prinsip tersebut bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari menjadi sangat penting (Ghazali, 2000). Hal ini juga mencakup pemahaman terkait bagaimana nilai-nilai Islam bisa ikut andil berkontribusi dalam tata kelola yang baik serta pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, sangat penting untuk melihat dan meneliti kembali karya-karya klasik contohnya Al-Mawardi dengan perspektif yang baru serta relevan dengan konteks kontemporer. Analisis yang kritis terhadap pemikiran Al-Mawardi tentu bisa memberikan pengetahuan yang berharga terkait bagaimana nilai-nilai etika Islam dapat dibumikan secara efektif dalam pemerintahan yang modern. Hal ini tidak hanya dapat membantu untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil serta harmonis tetapi juga dapat memperkuat integritas moral di dalam kehidupan politik (Lapidus, 2014).

Dengan demikian, penerapan etika politik Islam dalam konteks masyarakat kontemporer sangat membutuhkan pendekatan yang inklusif dan holistik. Ini melibatkan penggabungan nilai-nilai tradisional dalam kebutuhan dan tantangan modern, serta memastikan prinsip-prinsip moral dan etika Islam dijalankan dengan cara yang adil dan relevan. Pemikiran Al-Mawardi memberikan landasan yang sangat kuat untuk upaya ini, menawarkan panduan yang bisa diadaptasi untuk kemudian menciptakan tata kelola yang baik dalam masyarakat yang berkeadilan sosial. Penelitian lebih lanjut dan diskusi yang kritis mengenai isu ini akan sangat bermanfaat untuk mengamati lebih dalam bagaimana kemudian etika politik Islam dapat berkontribusi terhadap pembangunan masyarakat global yang jauh lebih baik.

Berangkat dari latar belakang diatas peneliti ingin meneliti terkait bagaimana konsep etika politik Islam menurut Al Mawardi serta bagaimana konsep etika politik Islam menurut Al Mawardi dapat di implementasikan dalam konteks masyarakat kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk mengeksplorasi penerapan etika politik Islam dalam masyarakat kontemporer dari sudut pandang Al-Mawardi. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam dan pemahaman konsep-konsep normatif dalam etika politik Al-Mawardi serta penerapannya dalam konteks modern. Metode deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis secara rinci pemikiran Al-Mawardi, serta menilai relevansi dan aplikasi praktisnya dalam konteks kontemporer.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi pustaka dengan mengkaji berbagai literatur primer dan sekunder yang relevan. Literatur primer meliputi karya-karya Al-Mawardi, terutama "Al-Ahkam al-

Sultaniyyah", sedangkan literatur sekunder mencakup buku-buku, artikel jurnal, dan makalah yang membahas pemikiran Al-Mawardi serta penerapan etika politik Islam dalam berbagai konteks. Analisis data dilakukan dengan mengidentifikasi tema-tema kunci dalam pemikiran Al-Mawardi, kemudian menghubungkannya dengan tantangan dan dinamika politik masa kini.

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Teknik ini melibatkan perbandingan dan verifikasi informasi dari berbagai sumber literatur untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif dan akurat tentang topik yang diteliti. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami dan menerapkan etika politik Islam dalam masyarakat kontemporer, khususnya melalui perspektif pemikiran Al-Mawardi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Etika Politik Islam Menurut Al Mawardi

Al-Mawardi, yang merupakan seorang ulama dan ahli hukum terkemuka dalam tradisi Islam klasik, dikenal dengan karya tersohornya "Al-Ahkam al-Sultaniyyah" yang menawarkan pandangan menyeluruh mengenai administrasi negara dan politik dalam konteks Islam. Konsep etika politik Islam menurut Al-Mawardi berfokus pada tanggung jawab, keadilan, dan moralitas yang wajib dimiliki oleh pemimpin dan mekanisme pemerintahan yang efektif serta adil.

Pertama-tama, Al-Mawardi menekankan begitu pentingnya keadilan ('adl) sebagai landasan atau prinsip utama dalam pemerintahan Islam. Keadilan dianggap sebagai dasar yang harus ditegakkan oleh setiap pemimpin agar dapat menciptakan stabilitas dan kesejahteraan di masyarakat. Pemimpin yang adil akan memastikan bahwasanya hak-hak rakyat akan dihormati dan setiap individu akan diperlakukan secara setara di hadapan hukum. Menurut pandangan Al-Mawardi, keadilan bukan hanya dalam aspek hukum, tetapi juga penyaluran kekayaan dan kesempatan yang adil bagi semua lapisan masyarakat (Al-Masri, 2005).

Selain itu, Al-Mawardi juga menekankan adanya tanggung jawab moral dan spiritual di dalam aspek kepemimpinan. Pemimpin wajib menjadi teladan untuk rakyatnya dalam hal kejujuran, integritas, dan ketakwaan. Ia berpendapat bahwa pemimpin yang memiliki moral akan dapat membangun kepercayaan dan rasa hormat dalam masyarakat, yang pada akhirnya dapat memperkuat legitimasi pemerintahan (Kamali, 2009). Integritas moral tersebut juga dapat diartikan bahwa pemimpin harus menghindari korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, dan memastikan transparansi dalam administrasi publik.

Konsep syura atau dikenal dengan musyawarah juga menjadi salah satu tiang penting dalam etika politik menurut Al-Mawardi. Syura adalah proses konsultasi dan partisipasi yang bersifat kolektif dalam mengambil keputusan yang diangkat dari tradisi Nabi Muhammad. Menurut Al-Mawardi, pemimpin penting melibatkan ulama dan tokoh masyarakat di

dalam proses penentuan keputusan untuk menjamin bahwa kebijakan yang dihasilkan mencerminkan aspek kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang luas (Butterworth, 1985). Prinsip ini sangat sejalan dengan konsep demokrasi modern yang mengutamakan partisipasi aktif dari warga negara di dalam proses politik.

Al-Mawardi juga menekankan pentingnya akuntabilitas dan efisiensi dalam administrasi negara. Pemimpin haruslah memastikan bahwasanya aparatur negara bekerja dengan efisien serta bertanggung jawab. Dalam hal ini termasuk penunjukan pejabat yang berintegritas dan kompeten, serta dilakukan pengawasan yang ketat terhadap kinerja aparat negara. Transparansi dalam mengelola keuangan negara juga turut andil menjadi kunci untuk menjaga stabilitas kepercayaan publik (Abdullah, 2005). Al-Mawardi menyatakan bahwa pemimpin haruslah bertindak sebagai pengelola yang baik dari sumber daya milik negara, memastikan bahwa kekayaan negara dipergunakan benar-benar untuk kesejahteraan masyarakat. Al-Mawardi benar dalam menyoroti pentingnya efisiensi dan akuntabilitas dalam administrasi negara. Penunjukan pejabat yang kompeten dan berintegritas serta pengawasan ketat terhadap kinerja mereka adalah langkah penting untuk memastikan pemerintahan yang efektif. Transparansi dalam pengelolaan keuangan negara tidak hanya menjaga kepercayaan publik tetapi juga memastikan bahwa sumber daya negara digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Prinsip-prinsip ini relevan dan sangat diperlukan dalam konteks pemerintahan modern untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.

Sedangkan dalam konteks hubungan internasional, Al-Mawardi menyatakan bahwa negara Islam wajib menjalin hubungan baik dengan negara-negara lain berdasarkan atas prinsip keadilan dan saling menghormati antar sesama. Diplomasi yang baik dan perjanjian yang adil merupakan cara untuk mencapai perdamaian dan stabilitas internasional. Akan tetapi, Al-Mawardi juga memberikan penekanan pada pentingnya mempertahankan kekuatan militer yang memadai agar dapat melindungi negara dari ancaman eksternal (Ramadan, 2004).

Al-Mawardi menawarkan panduan terkait bagaimana seorang pemimpin dalam mengelola konflik internal dan memastikan ketertiban umum. Ia menekankan urgensi hukum yang adil dan diimplementasikan secara konsisten agar dapat menyelesaikan sengketa dan kemudian mencegah kekacauan (Ahmad, 2001). Pemimpin haruslah bertindak cepat dan tegas untuk menanggapi pelanggaran hukum, tetapi juga harus tetap bijaksana dalam memberikan hukuman agar memastikan aspek keadilan tetap terjaga.

Secara keseluruhan, konsep etika politik yang ditawarkan Al-Mawardi memberikan pandangan yang begitu lengkap tentang bagaimana pemerintahan Islam harus dijalankan. Prinsip-prinsip keadilan, partisipasi kolektif, efisiensi, tanggung jawab moral, transparansi, dan ketertiban umum harus digabungkan dalam kesatuan kerangka kerja yang harmonis (Rosenthal, 2018). Pandangan ini bukan hanya relevan pada masa Al-

Mawardi, akan tetapi juga memberikan wawasan yang begitu berharga bagi pengembangan teori politik serta pemerintahan di era modern.

Konsep etika politik Islam menurut Al-Mawardi, yang terutama tertuang dalam "Al-Ahkam al-Sultaniyyah," menekankan keadilan sebagai landasan pemerintahan, di mana pemimpin harus menjunjung tinggi hak-hak rakyat dan distribusi kekayaan yang adil. Tanggung jawab moral dan spiritual, termasuk integritas dan ketakwaan, penting untuk membangun kepercayaan masyarakat. Prinsip syura mengedepankan partisipasi kolektif dalam pengambilan keputusan, sementara efisiensi dan transparansi dalam administrasi publik diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik. Dalam hubungan internasional, Al-Mawardi menekankan diplomasi adil dan kekuatan militer yang memadai. Konsep-konsep ini tidak hanya relevan pada masa Al-Mawardi tetapi juga memberikan panduan berharga bagi teori politik dan pemerintahan modern.

B. Implementasi Konsep Etika Politik Al Mawardi dalam Konteks Masyarakat Kontemporer

Agar dapat menjelaskan bagaimana konsep etika politik Islam menurut pandangan Al-Mawardi dapat diterapkan dalam konteks masyarakat kontemporer, harus dipahami bahwa pemikiran dari Al-Mawardi terutama yang tertuang dalam karyanya yang terkenal, "Al-Ahkam al-Sultaniyyah," yang merupakan panduan komprehensif tentang pemerintahan dalam Islam (An-Naim, 2018). Konsep-konsep yang dinyatakan Al-Mawardi mencakup aspek keadilan, tanggung jawab moral pemimpin, prinsip syura, administrasi publik yang efisien, perlindungan hak asasi manusia, hubungan internasional yang adil, dan pemberdayaan ekonomi dan sosial. Implementasi konsep-konsep ini sangat relevan dalam menghadapi tantangan dan dinamika masyarakat kontemporer yang begitu kompleks dan beragam.

Pertama-tama, Al-Mawardi menekankan terkait pentingnya keadilan sebagai pondasi utama dalam pemerintahan Islam. Dalam konteks modern saat ini, keadilan dapat diimplementasikan melalui sistem hukum yang adil serta merata, seperti yang ditegaskan dalam penelitian Al-Mawardi mengenai teori hukum Islam (Hashmi, 2001). Penerapan hukum yang adil merupakan hal esensial agar dapat menjamin perlindungan hak-hak individu dan kelompok di dalam masyarakat. Selanjutnya, menggaris bawahi bahwa keadilan sosial akan dapat dicapai melalui kebijakan-kebijakan redistribusi yang dapat mengurangi kesenjangan ekonomi.

Prinsip kedua yaitu tanggung jawab moral dan integritas pemimpin juga termasuk dalam aspek yang bersifat fundamental dalam etika politik menurut pandangan Al-Mawardi (Khan, 2015). Beliau menjelaskan bahwa integritas moral dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam merupakan prasyarat bagi keberhasilan pemerintahan yang beretika. Pemimpin yang memiliki moral dalam kepemimpinannya akan cenderung mengambil keputusan yang mempertimbangkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Prinsip ketiga yaitu syura, atau musyawarah, juga memiliki peran penting dalam pandangan Al-Mawardi. Dalam konteks modern, syura bisa diwujudkan melalui mekanisme demokrasi partisipatif, di mana masyarakat harus selalu dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan politik (Khaldun, 2007). Peran partisipasi aktif masyarakat di dalam proses politik diharapkan dapat meningkatkan legitimasi pemerintah dan menjamin representasi yang adil, sebagaimana yang diteliti oleh Abdullah. Prinsip syura, atau musyawarah, yang diusung oleh Al-Mawardi sangat relevan dengan mekanisme demokrasi partisipatif di era modern. Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik tidak hanya meningkatkan legitimasi pemerintah tetapi juga memastikan representasi yang adil dan inklusif. Partisipasi aktif masyarakat memungkinkan kebijakan yang diambil mencerminkan kepentingan dan kebutuhan rakyat, yang pada akhirnya memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintahan dan menciptakan stabilitas sosial dan politik.

Administrasi publik yang efisien dan transparan adalah salah satu prinsip lain yang dianjurkan Al-Mawardi (Auda, 2008). Mencatat bahwa teknologi informasi dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penggunaan e-government dan praktik open data dapat mengurangi korupsi dan meningkatkan kualitas layanan publik, sebagaimana yang diamati oleh Butterworth.

Perlindungan terhadap hak asasi manusia juga menjadi fokus penting dalam etika politik Islam menurut Al-Mawardi. Menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak dasar individu, termasuk kebebasan berpendapat, hak atas pendidikan, dan hak atas kesehatan. Ini sejalan dengan pandangan Ibn Khaldun tentang perlunya pemerintah yang adil dan efisien dalam mengelola kepentingan publik.

Dalam konteks hubungan internasional, Al-Mawardi mempromosikan prinsip hubungan yang adil dan damai antara negara-negara (Al-Faruqi, 2019). Menjelaskan bahwa diplomasi yang berdasarkan keadilan dan saling pengertian adalah kunci untuk mempertahankan perdamaian dunia. Negara-negara harus bekerja sama dalam menangani tantangan global seperti perubahan iklim dan terorisme dengan semangat saling menghormati, seperti yang disoroti oleh Khan. Setuju. Prinsip hubungan internasional yang adil dan damai yang dipromosikan oleh Al-Mawardi adalah fundamental dalam diplomasi modern (Rizvi, 2017). Diplomasi yang berlandaskan keadilan dan saling pengertian merupakan kunci untuk mencapai dan mempertahankan perdamaian dunia. Kolaborasi antara negara-negara dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim dan terorisme membutuhkan semangat saling menghormati dan kerja sama yang erat. Pendekatan ini tidak hanya membantu dalam menyelesaikan masalah global tetapi juga memperkuat hubungan internasional yang harmonis dan stabil.

Pemberdayaan ekonomi dan sosial juga merupakan komitmen penting dalam etika politik Al-Mawardi. Pemerintah harus menciptakan kebijakan

yang mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ini meliputi pembukaan lapangan kerja, meningkatkan akses ke pendidikan dan layanan kesehatan, serta mendukung usaha kecil dan menengah (Abdullah, 2017). Prinsip ini konsisten dengan pandangan Ibn Khaldun tentang kebutuhan untuk memperkuat struktur sosial yang berkelanjutan.

Kesejahteraan sosial dan distribusi kekayaan yang adil juga merupakan bagian dari visi Al-Mawardi tentang keadilan sosial. Menyarankan bahwa zakat dan infak dapat digunakan sebagai instrumen redistribusi kekayaan dalam Islam untuk memastikan kesetaraan sosial yang lebih besar (Black, 2001). Kebijakan fiskal yang progresif juga diperlukan untuk mendanai layanan publik yang merata dan berkualitas.

Pendidikan dan kesadaran moral adalah sarana untuk menciptakan masyarakat yang adil dan beretika menurut Al-Mawardi. Mencatat bahwa pendidikan harus mengajarkan nilai-nilai etika, keadilan, dan tanggung jawab sosial kepada generasi muda (Al-Mawardi, 2018). Ini sejalan dengan pandangan Khan tentang pentingnya karakter moral dalam membangun masyarakat yang stabil dan harmonis.

Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan juga penting dalam etika politik Islam menurut Al-Mawardi, menyarankan bahwa pemerintah harus bertindak sebagai pengelola yang baik dari sumber daya alam untuk kepentingan generasi masa depan. Ini melibatkan penggunaan teknologi hijau dan kebijakan lingkungan yang berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan ekologi dan ekonomi (Al-Farabi, 1998).

Penanganan konflik dan ketertiban umum adalah aspek lain dari pemerintahan yang efektif menurut Al-Mawardi. Menggaris bawahi perlunya hukum yang adil dan penegakan hukum yang efisien untuk mencegah ketidakstabilan sosial dan politik. Bahwa mekanisme mediasi dan arbitrase juga diperlukan untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang damai dan adil (Al-Faruqi, 2019).

Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemerintahan adalah salah satu cara untuk memastikan akuntabilitas dalam pemerintahan, sebagaimana dijelaskan oleh Abdullah (2005). Partisipasi aktif warga negara dalam proses politik dapat meningkatkan transparansi dan mengurangi praktik korupsi. Pemanfaatan teknologi dalam pemerintahan adalah alat penting untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi, seperti yang ditunjukkan oleh Butterworth (1985). Teknologi informasi dapat digunakan untuk meningkatkan aksesibilitas layanan publik dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses politik.

Terakhir, promosi nilai-nilai Islam dalam kebijakan publik adalah bagian dari implementasi etika politik Islam menurut Al-Mawardi. Esposito (2000) mencatat bahwa nilai-nilai seperti keadilan, kasih sayang, dan solidaritas sosial harus tercermin dalam kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, konsep etika politik Islam menurut pandangan Al-Mawardi menawarkan landasan yang sangat kuat untuk membangun pemerintahan yang adil, transparan, dan bertanggung jawab dalam konteks masyarakat kontemporer. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ini dalam kebijakan publik dan praktik pemerintahan, masyarakat dapat mengatasi tantangan kompleks saat ini dan menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan harmonis bagi semua warganya.

PENUTUP

Konsep etika politik Islam menurut Al-Mawardi menekankan pentingnya keadilan, tanggung jawab moral, dan efisiensi dalam pemerintahan. Al-Mawardi menegaskan bahwa keadilan adalah fondasi utama yang harus ditegakkan oleh pemimpin untuk menciptakan stabilitas dan kesejahteraan masyarakat. Pemimpin harus memiliki integritas, kejujuran, dan ketakwaan, serta melibatkan partisipasi kolektif melalui syura dalam pengambilan keputusan. Efisiensi dan transparansi dalam administrasi negara juga sangat penting, termasuk dalam pengelolaan keuangan dan penunjukan pejabat yang kompeten. Dalam hubungan internasional, diplomasi yang adil dan kekuatan militer yang memadai diperlukan untuk menjaga perdamaian dan stabilitas. Secara keseluruhan, pandangan Al-Mawardi memberikan panduan holistik untuk pemerintahan Islam yang relevan hingga era modern.

Konsep etika politik Islam menurut Al-Mawardi dapat diimplementasikan dalam masyarakat kontemporer melalui prinsip keadilan, tanggung jawab moral pemimpin, syura, administrasi publik yang efisien, perlindungan hak asasi manusia, hubungan internasional yang adil, dan pemberdayaan ekonomi dan sosial. Prinsip-prinsip ini menekankan pentingnya keadilan hukum, partisipasi kolektif, transparansi, dan efisiensi dalam pemerintahan, serta perlindungan hak-hak dasar individu dan kerjasama internasional untuk perdamaian global. Implementasi prinsip-prinsip ini dapat membantu menghadapi tantangan modern dan menciptakan pemerintahan yang adil dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. (2005). *Islamic Political Ethics: Civil Society, Pluralism, and Conflict*.
Abdullah, M. (2017). *Kritik Politik Machiavelli dalam Perspektif Islam: Studi Kasus Pemikiran Al-Mawardi*. Penerbit Mizan, Bandung.
- Ahmad, K. (2001). *Islam, Governance, and Democracy in the Modern Era*. Georgetown University Press.
- Al-Farabi, A. (1998). *Al-Farabi's Political Philosophy*. Cornell University Press.
- Al-Faruqi, I. R. (2019). *Al-Mawardi on the Nature of Political Authority*. Islamic Studies.
- Al-Masri, A. (2005). *The Dilemma of Islamic Political Ethics: The Case of the Palestinian Authority*. Middle East Journal, 59(4).
- Al-Mawardi, A. al-Hasan. (2000). *Al-Ahkam al-Sultaniyah*. London: Ta-Ha Publishers.
- Al-Mawardi, A. al-Hasan. (2018). *Justice and Governance in Islamic Political Thought: A Study of Al-Mawardi's Views*. Journal of Islamic Ethics.
- Al-Sayyid-Marsot, A. L. (2007). *Political Change in Modern Egypt: Historical Studies and Theoretical Perspectives*. American University in Cairo Press.
- An-Na'im, A. A. (n.d.). Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a. In 2008. Cambridge: Harvard University Press.
- An-Naim, A. A. (2018). *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law*. Syracuse University Press.
- Auda, J. (2008). *Ethics and Fiqh for Daily Life: An Introduction to Islamic Normative Ethics*. International Institute of Islamic Thought.
- Black, A. (2001). *The History of Islamic Political Thought: From the Prophet to the Present*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Butterworth. (1985). *Ethics in Islam: An Overview of Some of the Sources*.
- Esposito, J. L. (1998). *Islam and Politics*. Syracuse: Syracuse University Press.
- Farooq, Omar. (2017). *Distributive Justice and Need Fulfillment in an Islamic Economy*. Journal of Islamic Economics, Banking and Finance.
- Ghazali, A. Hamid. (2000). *Ihya Ulum al-Din*.
- Hashmi, S. H. (2001). *Islamic Political Ethics: Civil Society, Pluralism, and Conflict*. Political Studies 49, no. 5.
- Kamali, M. H. (2009). *Principles of Islamic Jurisprudence*. Islamic Texts Society.
- Khaldun, I. (2007). *The Muqaddimah*.
- Khan. (2015). *Islamic Statecraft and the Politico-Moral Duty*.
- Kurniati, Haris, & Rahman, Abd. (2022). Pandangan Hukum Islam terhadap Upaya Penanggulangan Konflik dan Bentrok Fisik di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 111–121.
- Lapidus, I. M. (2014). *A History of Islamic Societies*. Cambridge University Press.
- Mawdudi. (2016). *Islamic Way of Life*.
- Ramadan, T. (2004). *Western Muslims and the Future of Islam*. Oxford University Press.

- Rizvi, S. H. (2017). *Ethics and Politics in Classical Islamic Thought: Al-Mawardi's Contribution*. *Journal of Islamic Ethics*.
- Rosenthal. (2018). *Political Thought in Medieval Islam*.